

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azaz-azaz Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus, 2014, *Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua cetak keempat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

